

marin dilakukan uji coba," tutur Agus. Tak lama datang warga lain yang juga membenarkan hal tersebut. "Iya betul, bermanfaat ini mah betulnya, tapi kurang tuntas aja, yang kebangan air ya lahan yang dekat-dekat saja," tambah Ade ketua RT 05.

Menurut peraturan keduanya, pun selaras dengan apa yang disampaikan Lurah Karangwangi warga berterima kasih betul atas inovasi yang dihadirkan SRE di desa mereka. Berikut inovasi ini, mereka memiliki sedikit harapan untuk bisa menjawab permasalahan air yang selalu aben tiap musim kemarau tiba.

"Iya kemarin sudah ada surat, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi. Ya kedepan kita usahakan bagaimana lahan ini bisa produktif. Ini bermanfaat, sangat bermanfaat, apa lagi ada dua tulu opat atau sepuluh gitu kan kalau mau ngasih," ujar Agus dengan sedikit gusur berusaha mencairkan suasana.

Proyeksi Energi Terbarukan di Masa Depan

Dilansir dari Agensi Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Indonesia saat ini merupakan anggota terbesar dari Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) yang mengonsumi sekitar dua perlima dari total penggunaan energi di ASEAN. Selain berangkat dari keinginan untuk mewujudkan pengembangan energi bersih di Indonesia, Zagy mengungkapkan bahwa berdirinya SRE juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan Indonesia akan energi alternatif.

"Waktu awal kita bentuk SRE ini, karena kita ingin mengedepankan resource-resource yang tersedia di alam dan berkelanjutan," ungkap Zagy.

Lebih lanjut Zagy menambahkan, bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia dan posisi kedua untuk potensi pengembangan tenaga surya. Saat ini Indonesia memiliki pembangkit tenaga surya terbesar di dunia, namun pembangkit tenaga surya ini dinilai destruktif, tapi Zagy menilai bahwa bagian mana yang dinilai destruktif ini yang perlu dilaji.

Zagy menjelaskan bahwa memang dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga ada istilah destruktif, tetapi hanya pada saat first development saja. Pila itu mengasikan bahwa penilaian destruktif atau tidaknya perlu dilihat dari life cycle assessment, yaitu spektrum yang lebih luas mengenai kerja pembangkit tersebut.

"Kita harus melihat dari life cycle assessment, kalau misalkan kita melihat spektrum yang lebih luas lagi, energi fosil itu jauh lebih merusak lingkungan, kalau yang energi terbarukan, itu sumbernya selalu ada," jelas pria kelahiran Karangwangi tersebut.

Zagy tetap menilai bahwa pengembangan po-

tensi energi baru terbarukan atau energi bersih di Indonesia patut untuk diberdayakan. Meskipun begitu ia juga menegaskan bahwa bukan berarti kita harus menentang energi berbasis fosil. Tetapi perlu ada upaya beringan melalui langkah-langkah yang tepat.

"Apakah Indonesia harus melompati tahapan yang dilewati oleh Ngarai lain? Jawabannya adalah bisa iya bisa engga. Tetapi kita lihat kondisi yang ada di Indonesia, kita butuh yang affordable-kan, kita harus juga pakai yang PLTU" angkas Zagy.

Pemasangan renewable energy pada SRE juga tidak terlepas hanya untuk pengembangan energi baru terbarukan saja. SRE memaknai renewable energy sebagai energi yang pasti berkelanjutan. Zagy sendiri menegaskan bahwa ia bersama teman-temannya di SRE akan selalu mendukung terhadap apapun itu yang membantu proses transisi energi. Proyek energi bersih yang diuluti SRE juga merupakan langkah awal dalam pengembangan serta pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

Selain proyek pertama yang berada di Carut, proyek lain SRE yang dicanangkan sebagai percontohan juga hadir di beberapa kota. Contohnya proyek percontohan panel surya yang berada di posyandu Belasi. Panel surya yang dikembangkan di fasilitas masyarakat, diharapkan akan mengundang antusiasme warga untuk turut bertransisi menggunakan energi bersih.

"Banyak dari masyarakat sekitar di sini (Belasi, red) yang mulai bertanya-tanya tentang solar panel," ungkap warga Belasi bernama Lingga yang saat ditemui ASPIRASI Senin, (27/12/2021).

SRE hanya merupakan bagian kecil aksi pemuda Indonesia untuk ikut andil dalam transisi energi di Indonesia. Zagy berharap kedepannya ada banyak pergerakan untuk membunikan bahasa energi terbarukan, sehingga manfaatnya dapat terasa ke masyarakat di desa dan di kota, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Untuk itu Zagy mengungkapkan diperlukan strategi yang baik untuk mengajak masyarakat.

"Jadi saya juga ga bilang kita harus pindah ke energi bersih secepat mungkin, tidak juga. Tetapi harus dengan strategi baik," tutup Zagy.[]

Waktu awal kita bentuk SRE ini, karena kita ingin mengedepankan resource-resource yang tersedia di alam dan berkelanjutan



Ramai-Ramai Penolakan Komponen Cadangan di Perguruan Tinggi

Oleh: Shafa Azhara

Beberapa kalangan menilai penerapan komcad dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat

Sarapan, senam, lalu apel pagi. Kiranya itulah rutinitas pagi yang selalu dijalankan oleh Borhan selama 3,5 bulan mengikuti pelatihan sebagai anggota Komponen cadangan (Komcad). Borhan dan kawan-kawan, merupakan angkatan pertama Komcad yang terseleksi pada 2021 kemarin. Selama sebulan pertama menjalani pelatihan, Borhan dibekali pengetahuan seputar dasar-dasar militer.

"Bulan pertama itu kita masih materi-materi, PBB dan perguruan militer. Miralkan ada standar level, kita harus hormat. Lalu bagaimana etika ketika berhadapan lalu bertemu atasan dan sebagainya," ungkap Borhan yang merupakan mahasiswa FH 2019.

Selama Juni hingga Oktober, Rindam Jaya menjadi rumah sementara Borhan relasi mengikuti program pelatihan Komcad. Selain Rindam Jaya, terdapat empat rindam lainnya, tempat digelarnya pelatihan Komcad yang pesertanya berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Empat rindam lainnya yakni Rindam III Sitilwangi, Rindam IV Diponegoro, Rindam V Brawijaya, dan Rindam XII Tanjungpura Kalimantan.

Mendatar dari hati, merupakan alasan utama

mengapa Borhan betah meski penat kadang menghampirnya selama proses pelatihan. Borhan harus bangun pukul lima pagi setiap harinya, dan baru selesai beraktivitas sehabis mengikuti apel malam, jam Sembilan malam. Rutinitas itu terus berjalan, hingga pada akhirnya bulan Oktober lalu, pelatihan itu usai. Ia, seperti yang ramai diperbincangkan, Oktober tahun lalu, sebanyak 3.105 anggota Komcad resmi diangkat oleh Presiden RI, Joko Widodo.

UPNVU, kampus yang erat dengan flogon bela negara, tentu enggan ketinggalan menjadi bagian dalam angkatan pertama Komcad ini. Di antara ribuan anggota Komcad tersebut, 18 orang di antaranya merupakan anggota Komcad yang berasal dari kampus hijau. Koordinator Penerimaan Komcad UPNVU, Ikhwan Amar menyebutkan, 18 orang tersebut terbagi atas 16 mahasiswa dan 2 orang tenaga pendidik.

"Total pendftar sebenarnya ada 28, setelah dilakukan seleksi baik dari segi intelektual dan Kesehatan terjamin 18 peserta dari pegawai dan mahasiswa. Total 16 dari mahasiswa dan spesifik 6 dari FH, 4 dari FEB, 4 dari FIKES, dan 2 dari FIK. Sisanya 2 orang yang diteri-

ma dari pegawai kampus UPNVU," jelas Ikhwan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Nizam menegaskan, kampus UPN Indonesia menjadi penolakan penerimaan komcad tingkat pendidikan tinggi. Menurutnya, UPN Indonesia telah memiliki program bela negara dan latihan dasar yang bagus. Ia menyebut, agar UPN Indonesia dapat mengembangkan program-program bela yang negara yang dapat diikuti oleh kampus lain.

"Permintaan tersebut ditentang baik oleh para Rektor UPN. Tapi ada dari program tersebut hanya untuk mahasiswa UPN, saya minta kalau sudah berjalan sukses agar dapat diikuti oleh mahasiswa dari kampus-kampus lainnya juga," tambah Nizam.

Dua tahun yang lalu, tepatnya dalam Rapat Paripurna ke-11 masa sidang 2019-2020, DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Dengan diundangnya UU tersebut, maka setiap warga negara dapat secara sukarela berpartisipasi untuk ikut dalam kegiatan bela negara, dalam hal ini yaitu bergabung ke dalam Komcad.

Anggota Komcad sendiri berasal dari warga sipil yang secara sukarela mendaftar dan lolos seleksi. Mereka yang lolos seleksi, selanjutnya akan mendapat pelatihan selama kurang lebih 3,5 bulan. Anggota Komcad kemudian akan kembali ke profesinya masing-masing setelah selesai menjalani pelatihan langsung dengan TNI. Saat ini, Anggota Komcad berasal dari kalangan mahasiswa, ASN, dan pekerja swasta.

Meski angkatan pertamanya sudah dilantik, ternyata Komcad masih menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tim Advokasi Untuk Reformasi Sektor Keamanan, juga turut mengomentari aspek keakuratan dalam rekrutmen Komcad. Menurut Ayes, salah satu kerugian mengikuti komcad di tengah masih banyaknya pasal bermasalah pada UU PSDN adalah mengenai ancaman pidana dan pelanggaran HAM.

Menurut penuturnya, idealnya Komcad perlu dibentuk dengan menerapkan konsep keberatan hati nurani atau yang dikenal dengan *conscientious objection*. "Dia mempunyai hak menolak berdasarkan hati nuraninya. Jadi ketika ia merasa hati nuraninya menolak untuk dimobilisasi, ya it's okay. Gak ada masalah dia tidak mau dimobilisasi. Tapi UU PSDN kita masih mengutuk bahwa, ya lo bisa dipidana kalo lo gamau dimobilisasi," tambah Ayes.

Alih-alih mengutuk hal tersebut, dalam Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 UU PSDN, justru ada ancaman pidana bagi mereka yang menolak dimobilisasi. "Jadi memang ada hukuman sampai ketika memaknai konsep bela negara," sambung perempuan tersebut.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar menjelaskan, Komcad merupakan bagian dari sistem untuk memperkuat komponen utama. Tujuan utama Komcad, tentu untuk memperkuat komponen utama, yakni TNI. "Ini bertujuan dari amanat UU," tegasnya pada ASPIRASI (28/12/2021) lalu.

Saat ditemui di ruangannya, Dahnil menegaskan bahwa Komcad merupakan hal yang lumrah dimiliki sebuah negara. Ia memberikan contoh yang terjadi di Amerika. Menurutnya, di Amerika Serikat hampir semua warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan militer. "Jadi memang ada hukuman sampai ketika memaknai konsep bela negara," sambung perempuan tersebut.

Menurut Ayes, UU PSDN yang saat ini mendukung peraturan Komcad masih memuat banyak pasal-pasal

problematis di dalamnya. UU PSDN dinilai bermasalah baik dari segi substansi maupun dari segi prosedur. "Nggak banyak yang bermasalah. Baik dari segi ancaman, ancaman, dan pidana. Lalu juga penerapan hukum militer pada komponen cadangan. Jadi banyak hal dari dasar. Dari hulu ke hilir tuh udah salah itu UU PSDN," terangnya.

Ayes juga mengomentari, bahwa saat ini konsep bela negara masih bertentangan dengan narasi angket kenegaraan yang berpegang. Menurutnya, program seperti Komcad yang dibuat promosi bela negara, justru dapat dimaknai sebagai suatu konsep nasionalisme yang sempit. Lebih lanjut Ayes menjelaskan, bela negara tidak serta merta bernilai militer, tapi bisa dalam banyak hal. "Jadi memang ada hukuman sampai ketika memaknai konsep bela negara," sambung perempuan tersebut.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar menjelaskan, Komcad merupakan bagian dari sistem untuk memperkuat komponen utama. Tujuan utama Komcad, tentu untuk memperkuat komponen utama, yakni TNI. "Ini bertujuan dari amanat UU," tegasnya pada ASPIRASI (28/12/2021) lalu.

Saat ditemui di ruangannya, Dahnil menegaskan bahwa Komcad merupakan hal yang lumrah dimiliki sebuah negara. Ia memberikan contoh yang terjadi di Amerika. Menurutnya, di Amerika Serikat hampir semua warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan militer. "Jadi memang ada hukuman sampai ketika memaknai konsep bela negara," sambung perempuan tersebut.

Menurut Ayes, UU PSDN yang saat ini mendukung peraturan Komcad masih memuat banyak pasal-pasal

iki 2,4 juta tentara cadangan yang mereka sebut sebagai genta nasional. Kemudian ia mengambil contoh di Singapura. Jumlah tentaranya hanya sekitar 80ribuan. Namun, di sana memiliki Komcad yang hampir berjumlah 2 juta. Begitu pula yang terjadi di Korea Selatan.

Prinsip Keakuratan yang Semu?

Kontra, sebagai salah satu badan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Reformasi Sektor Keamanan, juga turut mengomentari aspek keakuratan dalam rekrutmen Komcad. Menurut Ayes, salah satu kerugian mengikuti komcad di tengah masih banyaknya pasal bermasalah pada UU PSDN adalah mengenai ancaman pidana dan pelanggaran HAM.

Menurut penuturnya, idealnya Komcad perlu dibentuk dengan menerapkan konsep keberatan hati nurani atau yang dikenal dengan *conscientious objection*. "Dia mempunyai hak menolak berdasarkan hati nuraninya. Jadi ketika ia merasa hati nuraninya menolak untuk dimobilisasi, ya it's okay. Gak ada masalah dia tidak mau dimobilisasi. Tapi UU PSDN kita masih mengutuk bahwa, ya lo bisa dipidana kalo lo gamau dimobilisasi," tambah Ayes.

Alih-alih mengutuk hal tersebut, dalam Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 UU



Foto: Istimedia

PSDN justru memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadi Komcad menghindari panggilan mobilisasi yang ancaman hukumannya mencapai 4 tahun. Selain itu, adanya iming-iming seperti konversi 20 SKS, pemberian uang saku, potongan biaya UKT sebesar 2,4 juta, serta tak perlu menyuntik skripsi dianggap Ayes telah menyalahi konsep kesukarelaan dari Komcad itu sendiri.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategi Indonesia (Lestraspi), Beni Sukandi, mengungkap, pasal ini sempat menjadi perdebatan. Namun, menurutnya pasal pidana tersebut dianggap perlu. "Karena dianggap dia sudah ikut serta bagian dari komcad, itu kan dia ikut gratifikasi, udah bayar, udah uang saku, udah denger, kemudian disiplin baju tempat segala macamnya. Nah, ini ketika dia dipanggil kena pidana ya itu wajar. Dan semua dari saya baca memang semua negara melakukan itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya di wilayah Depok.

Sepanjang tahun 2010 hingga 2018, Beni merupakan salah seorang yang ikut dilibatkan oleh DPR dalam pembuatan UU PSDN ini. UU yang kala Beni mulai digodok aspirasi 2007 ini, sudah dirubah 50ribu, sesuai dengan aspirasi dan masukan masyarakat. "Pede saat 2011 kami memotong hampir 50%, kami kasih draftnya. Oleh karena itu dari sisi substansi dan sisi materi kami sudah cukup puas. Sudah hampir mencapai 70% dari hasil target kami," sambungnya saat diwawancarai ASPIRASI, (20/12/2021) lalu.

Selain penerapan pasal pidana bagi anggota Komcad yang mengikis saat dimobilisasi, isi pasal yang tak kalah mencuri perhatian yaitu pasal mengenai diberlakukannya pidana militer bagi Komcad saat sedang dimobilisasi atau bertugas. Borhan nama aspen Borhan-ndono Setiaji, juga sependapat dengan Beni. Menurut Borhan, anggota Komcad yang kala itu mengikuti pelatihan, mendaftar dengan sepenuh hati. Ia justru malah mempertanyakan, di mana letak pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pembuat kebijakan UU PSDN.

Ujaya Militerisasi Kampus?

Ketua BEM UPNVU 2022, Bilal Sukarno mempertanyakan, azas lembaga pemanfaatan Komcad di perguruan tinggi. Dengan fungsi komcad yang problematis, menurutnya Komcad bisa memicu masalah. Nantinya, Komcad dikawatirkan memicu konflik horizontal di kalangan mahasiswa yang nantinya Komcad akan membentuk satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya.

"Garis besarnya, akan membunikan suara mahasiswa," tambah Bilal.

Menurutnya Komcad memang dibentuk untuk memperkuat komponen utama. Namun, di tubuh TNI sendiri masih memiliki masalah besar. Salah satunya terkait dengan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsat yang memerlukan dana tak sedikit. Bilal berpendapat,